

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Neoliberalisme tidak lagi beroperasi semata sebagai perangkat untuk kebijakan ekonomi, melainkan telah berkembang sebagai suatu rasionalitas pemerintahan yang membentuk cara negara, pasar, dan individu mengelola kehidupan sehari-hari (Brown 2015, 49). Dalam kerangka ini, berbagai aspek kehidupan manusia semakin diatur melalui logika efisiensi, produktivitas, dan kalkulasi ekonomi. Tubuh perempuan, khususnya, kerap diposisikan bukan sebagai subjek biologis dan sosial yang membutuhkan perlindungan, melainkan sebagai objek yang tunduk pada mekanisme pasar.

Namun, posisi tubuh perempuan dalam mekanisme pasar ini menandai sebuah pergeseran fundamental. Secara historis, manajemen menstruasi berada dalam ruang privat yang otonom; perempuan mengelolanya secara mandiri menggunakan metode tradisional yang minim biaya. Logika neoliberal kemudian mengintervensi ruang privat ini dengan mengonstruksi kebutuhan fabrikasi (*manufactured need*) atas nama higienitas dan modernitas. Akibatnya, terjadi pergeseran dari otonomi tubuh menuju ketergantungan pasar. Menstruasi, yang sejatinya merupakan proses biologis alami, mengalami proses komodifikasi dan kapitalisasi, di mana pemenuhan kebutuhan dasarnya tidak lagi menjadi hak, melainkan bergantung sepenuhnya pada daya beli individu.

Masalah muncul ketika ketergantungan pasar ini bertemu dengan penarikan diri negara. Seiring dengan kecenderungan negara untuk menarik diri dari tanggung jawab pemenuhan kesejahteraan sosial, termasuk dalam bidang kesehatan reproduksi, akses terhadap produk dan layanan menstruasi semakin diserahkan pada mekanisme pasar (Harvey 2005, 3). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, terutama bagi perempuan dari kelompok sosial ekonomi rendah, yang menghadapi keterbatasan akses terhadap produk sanitasi yang aman dan layak. Ketimpangan inilah yang melahirkan fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni situasi ketika perempuan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar menstruasi secara bermartabat akibat hambatan ekonomi dan struktural (Bobel et al. 2020, 32; Hennegan et al. 2021, 469). Dengan demikian, kemiskinan menstruasi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan individu, melainkan sebagai konsekuensi dari relasi kuasa dan struktur ekonomi-politik yang membentuk akses terhadap hak atas kesehatan dan martabat manusia.

Kemiskinan menstruasi (period poverty) adalah fenomena global ketika perempuan mendapat keterbatasan untuk mengakses produk menstruasi, pendidikan reproduksi, kesehatan reproduksi, air bersih dan sanitasi yang layak. World Bank merilis sekitar 500 juta perempuan tidak mempunyai akses terhadap produk menstruasi dan fasilitas sanitasi yang layak untuk manajemen higiene menstruasi (MHM) (World Bank 2018). Kemiskinan menstruasi merupakan krisis kesehatan global yang memengaruhi perempuan di negara kaya maupun miskin,

meskipun manifestasinya bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan dan lokasi geografis.

Di Indonesia, manifestasi dari kemiskinan menstruasi ini mengambil bentuk yang spesifik dan menjadi sorotan beberapa tahun yang lalu. Publik sempat dihebohkan dengan beredarnya "pembalut reject" yang dijual bebas dan masif di berbagai toko online. Sebagian publik awalnya merasa jijik karena mengira produk tersebut adalah pembalut bekas, namun faktanya itu merupakan produk asli pabrikan yang tidak lolos standar *Quality Control* (QC) (Magdalene 2023). Larisnya produk gagal QC ini adalah simptom yang jelas dari kemiskinan struktural. Berakar pada kemiskinan, banyak perempuan tidak dapat memprioritaskan pembalut sebagai kebutuhan primer dalam belanja bulanan. Akibatnya, ketika produk legal masih dirasa memberatkan, pasar *reject* yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ini menjadi satu-satunya alternatif yang terjangkau.

Maraknya pasar gelap ini bukanlah anomali pasar yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi logis dari kebijakan fiskal dan sosial yang timpang. Di satu sisi, negara secara aktif menciptakan hambatan keterjangkauan (*affordability barrier*) melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada produk menstruasi (CNBC Indonesia 2024b). Kebijakan ini menegaskan posisi negara yang mengklasifikasikan pembalut sebagai komoditas komersial biasa, bukan sebagai kebutuhan kesehatan pokok yang harus disubsidi atau diproteksi.

Fenomena pemajakan pembalut ini tidak hanya umum di Indonesia, namun juga beberapa negara yang memajak produk sanitasi ini. Mengutip dari

Statista, tarif PPN tampon di Hongaria saat ini sebesar 27%, tertinggi di antara semua negara anggota Uni Eropa. Denmark dan Swedia mengenakan pajak tampon sebesar 25%, sementara Yunani sebesar 24%. Namun, angka-angka ini hanya berlaku untuk tampon, dan mungkin tidak berlaku untuk produk kebersihan kewanitaan lainnya (Statista 2025). Tiga negara Uni Eropa saat ini memiliki tarif PPN nol untuk tampon: Irlandia, Siprus, dan Malta. Status bebas pajak untuk produk menstruasi telah ada di Irlandia bahkan sebelum aturan harmonisasi PPN di seluruh Uni Eropa berlaku; Siprus memberlakukan tarif PPN nol pada sejumlah produk penting, termasuk produk kebersihan kewanitaan, pada Oktober 2023; dan Malta menghapus pajak atas produk menstruasi pada Januari 2025 (Statista 2025).

Dalam diskursus ekonomi politik feminis, beban biaya yang timpang ini kerap dipayungi oleh istilah “Pink Tax”. Secara umum, *Pink Tax* diartikan sebagai biaya ekstra yang harus dibayarkan perempuan untuk produk dan layanan yang secara spesifik dipasarkan untuk mereka, dibandingkan dengan produk serupa untuk laki-laki (National Organization for Women 2024). Namun, dalam konteks kebijakan fiskal, fenomena ini mengerucut pada istilah yang lebih spesifik dan politis: “Tampon Tax” (pajak pembalut). Jika *Pink Tax* seringkali merupakan strategi penetapan harga oleh korporasi (*pricing strategy*), *Tampon Tax* adalah kebijakan negara yang secara eksplisit mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk menstruasi karena diklasifikasikan sebagai barang 'non-esensial' atau 'mewah'. Di Indonesia, penerapan PPN 12% pada pembalut menempatkan produk ini setara dengan barang komersial lainnya, mengingkari fakta bahwa bagi perempuan, pembalut adalah kebutuhan biologis mendasar,

bukan pilihan gaya hidup konsumtif. Kebijakan ini menegaskan posisi negara yang memandang tubuh perempuan sebagai objek pendapatan pajak, bukan subjek yang harus dilindungi hak kesehatannya.

Kombinasi antara struktur harga yang tinggi akibat dominasi oligarki dan beban PPN 12% inilah yang secara efektif menciptakan ruang pasar bagi menjamurnya penjualan pembalut reject. Di sinilah letak ironi terbesarnya: di tengah krisis aksesibilitas ini, negara tidak hadir menyediakan solusi berupa subsidi atau intervensi harga, melainkan justru memperberat beban melalui kebijakan fiskal. Absennya solusi dari negara memaksa masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan mekanisme bertahan hidup (*survival mechanism*) yang tragis: beralih mengonsumsi limbah industri atau pembalut reject yang terjangkau secara finansial, namun berisiko tinggi secara medis. Fenomena ini bukan sekadar cerminan kemiskinan, melainkan bukti nyata bahwa negara telah gagal menjalankan fungsi fundamentalnya (*state failure*) untuk melindungi segenap bangsa dan menjamin hak kesehatan reproduksi warganya dari eksploitasi pasar yang predator.

Kegagalan negara ini diperparah oleh struktur pasar industri pembalut yang bersifat oligopolistik dan sangat bergantung pada keran impor. Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi dominasi produk impor dan bahan baku murah bagi korporasi multinasional telah menciptakan 'sistem gurita' yang mematikan daya saing industri lokal (UMKM). Akibatnya, terjadi polarisasi pasar yang ekstrem: pasar resmi dikuasai oleh segelintir merek global dengan harga yang ditentukan secara sepihak, sementara produk UMKM yang menawarkan

keberlanjutan (sustainability) menjadi terlalu mahal untuk diproduksi dan diakses rakyat banyak. Ketiadaan opsi tengah yang terjangkau dan aman inilah yang menjebak perempuan miskin dalam pilihan semu (*illusion of choice*); memaksa mereka mengonsumsi limbah industri (pembalut reject) karena sistem pasar yang ada telah menutup akses mereka terhadap produk yang layak.

Dominasi bisnis pembalut dikuasai oleh oligarki atau berasal dari golongan tertentu. Di Nepal, industri pembalut lokal mati karena pemerintah lebih mendukung pembalut impor (Ekantipur 2024). Di Zimbabwe, terdapat 47% perempuannya lebih memilih untuk menggunakan pembalut impor daripada pembalut lokal karena karakteristik kinerjanya seperti kenyamanan, pengendalian bau, ukuran, daya serap, daya rekat perekat, kemasan dan perlindungan dari tusukan (Nyoni et al. 2014, 6). Di Indonesia, saat ini pasar pembalut dikuasai tiga perusahaan multinasional besar, PT Unicharm, PT Kao, dan PT Kimberly-Clark Softex—yang mana sebelumnya Softex adalah produk lokal sebelum diakuisisi oleh perusahaan multinasional asal Amerika Serikat itu (Top Brand Awards 2025).

Dengan demikian, fenomena kemiskinan menstruasi di Indonesia tidak dapat lagi disederhanakan sebagai masalah ketidakmampuan ekonomi individu semata. Lebih dari itu, penelitian ini mendudukan fenomena tersebut sebagai bentuk kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan ini tidak dilakukan oleh pelaku tunggal secara fisik, melainkan oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik melalui pajak yang diskriminatif (PPN 12%), dominasi oligarki impor, dan pembiaran pasar ilegal, yang secara sistematis menghalangi perempuan untuk

memenuhi kebutuhan biologis dasarnya. Dalam cengkraman neoliberalisme ini, tubuh perempuan tidak hanya dieksploitasi sebagai objek pajak dan pasar, tetapi juga dibiarkan terpapar risiko kesehatan permanen atas nama mekanisme pasar

Dominasi mutlak produk impor dan korporasi multinasional dalam struktur pasar ini menciptakan paradoks harga yang mematikan industri lokal. Produk UMKM lokal, yang seringkali menawarkan nilai tambah berupa keberlanjutan (*sustainability*) dan keamanan bahan baku, justru terjebak dalam struktur biaya produksi yang tinggi akibat ketiadaan subsidi negara dan hambatan impor bahan baku. Akibatnya, harga produk lokal menjadi jauh lebih mahal dibandingkan produk impor massal yang diproduksi dengan skala ekonomi raksasa. Ketimpangan harga ini tidak hanya membunuh daya saing UMKM, tetapi juga secara langsung menciptakan stratifikasi kelas sosial (*class stratification*) dalam manajemen menstruasi.

Terbentuklah jurang pemisah yang tajam: perempuan kelas menengah-atas di wilayah urban memiliki privilese untuk mengakses produk pembalut berkualitas, ramah lingkungan, atau produk UMKM premium. Sebaliknya, perempuan miskin dan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan (*rural*), terasing dari akses tersebut. Tanpa pilihan yang terjangkau, mereka dipaksa bergantung pada produk murah berkualitas rendah dari oligarki atau terjerumus ke pasar pembalut *reject*. Dengan demikian, kemampuan seorang perempuan untuk menstruasi dengan aman dan bermartabat kini sepenuhnya ditentukan oleh posisi kelas ekonominya, sebuah realitas yang menegaskan bahwa kesehatan reproduksi di Indonesia telah menjadi komoditas eksklusif, bukan hak universal

Pentingnya penelitian ini adalah untuk membongkar kemiskinan menstruasi di Indonesia dari kacamata yang jarang digunakan, yaitu sebagai masalah politik struktural, bukan sekadar masalah sosial atau kesehatan. Alih-alih berfokus pada solusi hilir berbasis produk atau intervensi NGO (seperti kebanyakan kajian MHM), penelitian ini menawarkan kritik hulu yang fundamental. Dengan menggunakan lensa feminisme sosialis dan neoliberalisme, penelitian ini berargumen bahwa fenomena kontradiktif seperti PPN 12% dan maraknya pembalut reject bukanlah 'kecelakaan' atau kegagalan pasar semata, melainkan fitur sistemik dari cara negara mengatur tubuh warganya dari tangan-tangan oligarki. Oleh karena itu, signifikansi utama penelitian ini adalah untuk menggeser wacana: dari period poverty sebagai 'masalah amal' yang membutuhkan donasi, menjadi 'masalah kebijakan' yang menuntut perubahan regulasi fiskal dan pengawasan pasar yang tegas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian utama: "Bagaimana menstruasi dalam cengkaman sistem neoliberalisme melanggengkan praktik oligarki dalam industri pembalut sebagai bentuk kekerasan struktural yang berdampak terhadap kemiskinan menstruasi pada perempuan Indonesia?" Sesuai dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membongkar dan menganalisis peran negara melalui legitimasi oligarki di industri pembalut dan melanggengkan kemiskinan menstruasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses dan hasil fenomena menstruasi dalam cengkaman sistem neoliberalisme melanggengkan praktik oligarki dalam industri pembalut sebagai bentuk kekerasan struktural pada perempuan Indonesia; dan (2) menganalisis dampak kekerasan struktural terhadap kemiskinan menstruasi pada perempuan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat dengan harapan dapat berkontribusi terhadap pemangku kepentingan terkait dalam pembahasan kemiskinan menstruasi.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan akademis untuk memperdalam kajian Kritik Neoliberalisme dalam kerangka Feminisme Sosialis. Penelitian ini berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan analisis antara level makro (kebijakan negara, oligarki pasar, dan rantai pasok global) dengan level mikro (pengalaman tubuh perempuan dan ekonomi rumah tangga). Hal ini memperkaya literatur Ekonomi Politik Global dengan menunjukkan bahwa mekanisme pasar global tidak hanya berdampak pada angka ekonomi, tetapi menciptakan bentuk kekerasan struktural yang spesifik pada kelompok gender marginal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat penting untuk enam pihak: (1) sebagai rujukan untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan kebijakan yang berfokus pada penghapusan hambatan ekonomi dan struktural terhadap akses menstruasi; (2) bagi Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan pasar dan menindak tegas peredaran produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan kesehatan; (3) bagi aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai rujukan untuk advokasi advokasi struktural yang menuntut penghapusan PPN produk menstruasi dan perlindungan negara dari pasar ilegal; (4) bagi akademisi sebagai rujukan untuk eksplorasi penelitian di bidang Neoliberalisme dan Ekonomi Politik Global dalam perspektif Feminisme Sosialis; (5) bagi kelompok perempuan sebagai konsumen sebagai bahan rujukan untuk memperdalam literasi tentang kesehatan reproduksi serta membangun kesadaran untuk hak-hak perempuan sebagai konsumen dan warga negara; (6) bagi Sektor Swasta atau Korporasi Multinasional sebagai bahan rujukan untuk evaluasi terhadap pengelolaan limbah industri, terutama untuk pembalut yang tidak lolos QC.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal TA ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang kemiskinan menstruasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang kemiskinan menstruasi memuat metode penelitian mendeskripsikan kapitalisasi menstruasi dan kekerasan struktural.

BAB III MENSTRUASI DALAM CENGKRAMAN NEOLIBERALISME DAN OLIGARKI INDUSTRI PEMBALUT DI INDONESIA

Bab ini menyajikan uraian deskriptif dan analisis mendalam mengenai manifestasi rezim neoliberal dalam tata kelola kebutuhan esensial masyarakat, yang secara spesifik berdampak pada privatisasi sektor kesehatan reproduksi.

BAB IV KEKERASAN STRUKTURAL DALAM KAPITALISASI MENSTRUASI DAN PERLAWANAN GERAKAN FEMINISME DI INDONESIA

Bab ini membahas bagaimana kapitalisasi dan komodifikasi menstruasi yang didorong oleh oligopoli korporasi, serta diperkuat oleh kelalaian Indonesia, menghasilkan kekerasan struktural terhadap perempuan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait dinamika ekonomi politik kemiskinan menstruasi di Indonesia.

